MEMBERDAYAKAN HUBUNGAN PAROKI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KATOLIK DI MASA KRISIS

Suatu Program yang Plausibel dalam Komunitas Basis

G. Budi Subanar, SJ

Abstrak

Hubungan antara paroki (orang kristiani setempat) dan biara serta sekolah menentukan wajah Gereja Katolik di Indonesia, dan selama lebih dari seratus tahun interaksi atau kerja sama antara ketiga lembaga dan gerak itu membuat Gereja Katolik bertumbuh di Indonesia. Apakah dalam situasi krisis diperlukan paradigma baru, yang menjaring paroki dan terutama sekolah, agar warta yang dibawa Gereja tetap plausibel?

Karangan ini melacak sejarah pertumbuhan paroki sampai pada titik krisis sekarang ini; dan demikian pula diikuti sejarah pertumbuhan lembaga pendidikan katolik sampai titik kritis. Apakah dibuka terobosan baru, kalau (tempat) sekolah Katolik menjadi jauh dari (tempat gedung) Gereja paroki? Apakah dalam model "Gereja diaspora" sekolah dan paroki dapat menemukan tempat tepat dan dapat berhubungan lebih nyata serta melayani manusia dan Injil dengan lebih jujur?

Pengantar

Pembahasan tema plausibilitas agama dan warta kristiani dapat dilakukan dari berbagai segi. Tulisan berikut secara khusus akan memfokuskan pada hubungan antara paroki dengan lembaga pendidikan Katolik. Sebagai titik berangkat pembahasan, berikut ini akan diketengahkan sebuah kasus.

Seorang pastor paroki di suatu Paroki X, di wilayah Keuskupan Y, dalam suatu kesempatan mengungkapkan gagasan dan rencananya untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan kurangnya lahan parkir bagi umat paroki yang setiap kali menghadiri perayaan Ekaristi mingguan. Mengingat paroki tidak memiliki lapangan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan, sang pastor mengusulkan untuk menjadikan kompleks susteran dan kompleks sekolah dasar yang berdekatan dengan gereja paroki menjadi lapangan parkir. Ada pun sebagai ganti lahan untuk kompleks susteran dan kompleks sekolah dasar akan diberikan tanah baru yang terpisah dari tempat lama, yakni sebuah lahan yang berdekatan dengan sebuah pasar. Istilah yang populer saat ini untuk kasus tersebut adalah mengadakan "tukar guling" *(ruislaag)*. Untuk gagasan dan rencana tersebut, sang pastor selain mensosialisasikan gagasan dan rencananya kepada umat paroki, juga akan menghubungi pihak-pihak yang terkait yakni: guru-guru dan pengurus yayasan serta pihak susteran. Sampai di sini proses belum selesai karena dalam hal ini, pihak keuskupan juga merupakan pihak yang turut menentukan apakah gagasan dan rencana tersebut dapat dilaksanakan.

Kasus di atas diangkat untuk memperlihatkan adanya suatu kemungkinan munculnya paradigma baru sebagai alternatif dari paradigma lama yang menyangkut hubungan antara paroki dan lembaga pendidikan serta evaluasi dan refleksi atas paradigma baru yang dimunculkan.

Kemunculan dan Bertumbuhnya Sebuah Paroki

Dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia, kemunculan suatu paroki di suatu tempat dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang berlainan. Pada sejumlah paroki tua peninggalan zaman kolonial Belanda, khususnya di wilayah kota-kota besar, gedung gereja paroki dibangun bersamaan dengan tumbuhnya kompleks perkotaan dari masa kolonial Belanda dalam kaitannya dengan kebutuhan penduduk untuk memiliki tempat peribadatan.[1] Pada wilayah-wilayah perkebunan, paroki diawali oleh sejumlah keluarga Belanda yang bekerja sebagai administrator perkebunan; dalam perkembangan selanjutnya, umat Katolik di wilayah tersebut mencakup pula sejumlah keluarga kaum pribumi setempat.[2] Ada pula sejumlah paroki yang diawali dengan adanya sekolah-sekolah Katolik di wilayah tersebut.[3] Dalam perkembangan beberapa dasawarsa terakhir, paroki-paroki baru dibangun di wilayah-

wilayah perumahan yang merupakan pengembangan wilayah pemukiman baru.[4]

Di mana gereja paroki dibangun setelah sebelumnya didahului dengan adanya sekolah Katolik, gereja paroki dibangun tidak jauh dari kompleks persekolahan yang telah ada. Demikian pun sebaliknya, terdapat sejumlah kasus di mana sebuah paroki telah diawali dengan pendirian gedung gereja, kemudian menyusul bangunan kompleks persekolahan. Di samping hal tersebut, bila persekolahan tersebut dikelola oleh suatu kongregasi imam, bruder, suster tertentu, kompleks tersebut juga dilengkapi dengan bangunan biara dari kongregasi yang mengelola persekolahan tersebut. Atau sebaliknya, gedung biara mendahului kompleks persekolahan yang dikelolanya menyusul kemudian sebuah paroki. Dengan demikian, dalam sejarahnya, antara ketiga pihak, yakni gedung gereja, bangunan biara, dan kompleks persekolahan, terjalin hubungan satu sama lain. Demikianlah suatu potret singkat bagaimana sebuah gereja paroki berkembang dalam kaitannya dengan suatu biara dan kompleks persekolahan.

Dinamika dan Keragaman Pelayanan Paroki-Paroki

Menurut Hukum Kanonik (yang berkembang dari abad XII sampai pembaruannya yang terakhir di tahun 1983), sebuah paroki merupakan suatu institusi yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi rohani dan dimensi material, temporal. Sebagai suatu institusi berdimensi rohani, paroki mempunyai tanggung jawab untuk reksa pastoral. Konsep reksa pastoral, yang mencakup pelayanan sakramental serta pembinaan kehidupan moral umat yang menjadi tanggung jawab paroki mulai berkembang sejak Konsili Trente (1545-1563), dengan latar belakang sejarah yang mengacu pada gerakan Reformasi dan Kontra-Reformasi saat itu. Sebagai institusi yang berdimensi material-temporal, suatu paroki mencakup suatu wilayah tertentu dengan segala urusan pemilikan harta materiil lainnya. Dalam perkembangan sejarah misi sejak abad XV, di mana para misionaris mulai dengan usaha pewartaan Injil serta mengadakan pembaptisan bagi orang yang menanggapi pewartaan Injil tersebut, usaha tersebut disusul pula dengan pendirian sekolah, klinik, bangunan kapel dan gereja serta biara-biara, sehingga menyebar luaslah usaha para misionaris dengan berbagai institusinya tersebut ke wilayah-

wilayah di luar Eropa: Afrika, Amerika, Amerika Latin, serta Asia.[5] Berbagai usaha yang telah berlangsung dalam sejarah misi tersebut mulai dari pewartaan, pembaptisan, reksa pastoral, serta penanganan berbagai institusi pendidikan, kesehatan, peribadatan itulah yang kemudian dilaksanakan oleh paroki-paroki.

Di dalam realitas kehidupan Gereja Katolik di Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke saat ini, paroki-paroki yang melanjutkan pewarisan usaha para misionaris tersebut sekaligus juga berkembang selaras dengan kebutuhan setempat. Di dalam dinamika perkembangannya, setiap paroki juga memiliki kekhasannya masing-masing. Beberapa faktor penentunya antara lain: letak geografis dan keluasan wilayahnya, homogenitas atau heterogenitas etnis dan agama dari penduduk di mana umat Katolik yang dilayaninya berada, serta kebutuhan khusus umat setempat. Dari letak geografis yang menjadi faktor penentu, muncullah perbedaan tipe-tipe paroki: paroki di wilayah perkotaan, paroki di pedesaan, paroki di wilayah kepulauan, atau paroki di wilayah hutan pedalaman. Dalam paroki-paroki di kota, umatnya terkonsentrasi mengumpul di wilayah padat penduduk, sedangkan di paroki pedesaan, umat menyebar di keluasan wilayah. Terlebih lagi pada daerah kepulauan dan hutan pedalaman, umat menyebar di wilayah geografis yang lebih luas lagi.[6] Homogenitas atau heterogenitas etnis dan agama dari masyarakat setempat serta kebutuhan khusus tertentu juga memberikan kepada paroki corak tersendiri.

Keragaman corak paroki dan umat yang ada memunculkan bentuk-bentuk pelayanan dan membentuk tipe komunitas yang beragam. Bentuk-bentuk pelayanan dan berbagai tipe komunitas tersebut sejalan dengan kondisi kehidupan umat, serta kemampuan tenaga pastoral yang melayani. Berbagai tipe komunitas yang dapat terbentuk meliputi: komunitas yang berpusat pada ekaristi, komunitas yang berpusat pada Sabda, komunitas yang berpusat pada hidup sosio-ekonomi, komunitas yang berpusat pada aspek sosio-budaya. Sebuah paroki di wilayah perkotaan, atau wilayah pedesaan yang memungkinkan pastornya mampu bergerak secara mobil, memungkinkan umat paroki mendapatkan pelayanan ekaristi dari pastornya dalam frekuensi yang kerap dan teratur akan membentuk komunitas yang berpusat pada ekaristi. Dari rahmat yang ditimba pada perayaan ekaristi itulah komunitas dan para anggotanya akan memperoleh semangat serta inspirasi untuk kehidupan

hariannya (LG 7, SC 26). Lain halnya dengan paroki di wilayah kepulauan dan hutan pedalaman. Untuk bisa berkunjung ke stasi-stasi seorang pastor terpaksa harus menggunakan pesawat (untuk wilayah Papua), perahu motor (Kalimantan, Maluku), masih disambung jalan kaki yang memakan waktu berhari-hari. Dengan demikian, seorang pastor tidak dapat setiap saat hadir di berbagai tempat. Sebagai alternatifnya, di wilayah-wilayah tersebut peran pemimpin jemaat pembantu pastor menjadi sangat menentukan. Maka, di wilayah-wilayah tersebut akan terbentuk komunitas yang berpusat pada Sabda pengganti ekaristi. Di kedua situasi komunitas di atas, dapat pula terbentuk komunitas-komunitas yang berpusat pada aspek sosio-ekonomi, dan sosio-budaya. Kedua tipe komunitas terakhir ini akan sangat cocok untuk diterapkan pada wilayah di mana terdapat suatu masyarakat yang heterogen agamanya sehingga meretas eksklusivitas komunitas; sebab komunitas yang berpusat pada aspek sosio-ekonomi dan sosio-budaya bersifat terbuka terhadap perbedaan-perbedaan agama. Tipe komunitas semacam ini juga perlu untuk diterapkan pada wilayah yang masyarakatnya memang membutuhkan stimulan pada bidang sosio-budaya atau sosio-ekonomi. Dalam istilahnya, komunitas-komunitas tersebut merupakan Komunitas Basis Kristiani dan Komunitas Basis Manusiawi.

Di samping keragaman tipe-tipe paroki serta bentuk-bentuk komunitasnya, dinamika perkembangan sebuah paroki secara sosiologis akan melalui tahapan fase-fase berikut: fase awal, fase eksperimental, fase formal, dan fase kritis.[7] Sebuah paroki berada pada fase awal berarti bahwa paroki tersebut berada pada awal perkembangannya. Hal ini berarti bahwa pada tataran aspek nilai-nilai normatif paroki tersebut baru terbentuk oleh ajaran-ajaran kerigmatik; dan ini menyerupai suatu komunitas kecil yang mempunyai ikatan erat. Fase eksperimental berarti bahwa paroki yang sudah memulai fase awal perkembangannya akan berhadapan dengan berbagai masalah mendesak yang harus dihadapi sehingga memunculkan kecenderungan untuk membentuk kelompok-kelompok yang merupakan pelipatgandaan dan pemberdayaan dari satuan-satuan kelompok yang telah ada. Dinamika paroki berkembang dengan memasuki masa formal, yakni ketika terjadi proses konsolidasi dan penstabilan dari berbagai struktur dan fungsi yang telah ada di dalam paroki. Selanjutnya, paroki juga akan mengalami tahap kritis ketika harus menjalani tahap transformasi berhadapan dengan suatu fenomena baru yang harus dihadapi oleh paroki.

Dalam dinamika perkembangannya yang wajar, paroki-paroki akan mengalami fase-fase tersebut pada masa yang tidak bersamaan. Dalam situasi saat ini, di mana Indonesia tengah memasuki dan mengalami suatu masa transisi perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, secara serempak pula paroki-paroki masuk fase krisis, suatu masa di mana Gereja Katolik Indonesia menjalani sebuah tahap transformasi berhadapan dengan fenomena yang kurang lebih sama, ditandai oleh suatu krisis ekonomi, berbagai konflik sosial yang diwarnai dengan kekerasan oleh faktor penyebab yang beragam sehingga mempengaruhi pola hubungan sosial dan budaya yang telah berlangsung selama ini. Perubahan yang tengah terjadi ini telah menimbulkan pula banyak korban yang perlu ditangani sebagaimana tampak dalam sejumlah gejala: angka pengangguran yang makin tinggi, kemiskinan yang makin meluas, para pengungsi yang muncul di berbagai wilayah. Dengan demikian, tepatlah kiranya bahwa dalam sidang tahunannya, November 2000 lalu, para uskup dan sejumlah wakil umat Katolik se-Indonesia membicarakan masalah Komunitas Basis Gerejawi dan Manusiawi untuk berproses memberikan jawab terhadap tantangan yang ada.

Lembaga Pendidikan Katolik, Sejarah, dan Perkembangannya

Dalam sejarah perkembangan berbagai wilayah gerejawi Indonesia, dapat kita jumpai tokoh-tokoh pendidikan atau sebuah ordo dan kongregasi religius yang berjuang untuk merintis berdirinya lembaga pendidikan Katolik. Untuk ordo dan kongregasi religius tertentu, perjuangan tersebut sudah dimulai ketika masih berada dalam masa kolonial Belanda, sebab kedatangan ordo dan kongregasi tersebut ke Indonesia memang diminta oleh Vikaris Apostolik Batavia (sampai dengan akhir abad XIX, Vikariat Apostolik Batavia merupakan satu-satunya wilayah gerejawi yang membawahi seluruh kepulauan Nusantara) untuk menangani pendidikan dan mengurus rumah yatim, atau menangani karya kesehatan yang kemudian berkembang merambat pada bidang pendidikan.[8] Bentuk-bentuk pendidikan yang semula bersifat embrional, dalam perkembangannya kemudian menjadi sebuah institusi pendidikan yang kokoh mencakup berbagai bidang kejuruan serta meliputi wilayah yang luas jangkauannya. Demikian pun kelompok yang dilayaninya juga mengalami perkembangan. Semula karya pendidikan mereka diarahkan

pada anak-anak dari keluarga Belanda, Indo, dan etnis Cina yang dalam status hukum kolonial Belanda merupakan warga masyarakat istimewa, berbeda dengan kelompok pribumi. Dalam perkembangannya, kelompok layanan lembaga pendidikan juga meluas kepada anak-anak kaum pribumi.

Usaha Pater F. van Lith, SJ di Muntilan merupakan salah satu kekecualian. Sudah sejak awal, Pater van Lith mengarahkan diri untuk pendidikan anak-anak pribumi. Dengan demikian, karena memberikan suatu alternatif dari pelayanan pastoral dan pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya, karya Pater van Lith merupakan sebuah karya perintisan dan terobosan.[9] Dalam perkembangan lebih lanjut, murid-murid hasil didikan kolese di Muntilan tersebut menjadi guru-guru yang mengawali berdirinya persekolahan yang bernaung di bawah Yayasan Kanisius yang bergerak di wilayah Jawa Tengah.[10] Di beberapa wilayah, sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Kanisius tersebut menjadi perintis bagi berdirinya sejumlah paroki.[11]

Pada awal kemerdekaan, ketika Republik Indonesia baru memulai menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara, lembaga pendidikan Katolik merupakan salah satu pihak yang telah siap untuk menjalankan fungsinya memberikan pendidikan kepada anggota masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karenanya, dalam kurun waktu tertentu, cukup banyak lembaga pendidikan Katolik mendapat subsidi pemerintah. Permasalahan muncul ketika terjadi perubahan *policy* pemerintah dalam pengurangan dan peniadaan subsidi.[12]

Sebuah kemudahan lain yang dialami oleh lembaga pendidikan Katolik adalah diakuinya sifat khas dari lembaga pendidikan Katolik. Sebagai lembaga pendidikan yang khas, lembaga pendidikan Katolik memiliki hak untuk memberikan pengajaran agama sesuai dengan kekhasannya sehingga di sekolah-sekolah Katolik pada bidang studi agama hanya diajarkan pelajaran agama Katolik. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 (UU No. 2/1989) tetap menjamin kekhasan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, UU No. 2/1989 tersebut masih diatur oleh peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga seorang pejabat pemerintah dapat mengeluarkan keputusan yang mengaturnya secara lain, yang mungkin berbeda dengan jiwa yang ada dalam undang-undang itu. Hal tersebut juga menimbulkan gejolak tersendiri sebagaimana terjadi pada pertengahan tahun 2000.

Sudah sejak awal dekade lalu, para ahli bidang pendidikan membahas dunia pendidikan memasuki milenium III dengan beragam tantangan serta peluangnya.[13] Situasi baru berkembang dengan isu demokratisasi, yang berkaitan pula dengan pemberian otonomi, juga menyentuh pula pada bidang pendidikan. Tantangan dan peluang baru dalam otonomi pendidikan memunculkan situasi kritis bagi berbagai lembaga pendidikan.[14]

Pemisahan Kompleks Paroki, Sekolah Katolik, dan Biara: Sebuah Terobosan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran?

Kini kami kembali pada kasus di atas: Dalam masa kritis yang dialami, baik oleh paroki mau pun oleh lembaga pendidikan Katolik, seorang pastor paroki mengeluarkan gagasan dan rencana sebagaimana telah disebut di atas. Terlepas dari maksud untuk menilai siapa diuntungkan dan siapa dirugikan dalam gagasan dan rencana tersebut di atas, dapat dipertanyakan apakah rencana dan gagasan di atas dapat dikemukakan sebagai sebuah ide terobosan yang tepat waktu dan tepat sasaran? Dalam paparan singkat di atas, diperlihatkan bahwa gereja paroki dalam sejarahnya memiliki suatu keterkaitan dengan kompleks persekolahan dan biara. Demikian pun, dinamika dan perkembangan paroki dan lembaga pendidikan Katolik masing-masing telah diuraikan. Pada saat ketiganya telah memiliki eksistensinya masing-masing, dan saat paroki dan lembaga pendidikan Katolik memasuki suatu tahap kritis, diketengahkan ide pemisahan gereja paroki dari kedua unsur lain.

Dengan ide pemisahan kompleks tersebut, sebenarnya dikemukakan sebuah paradigma baru sebagai ganti dari paradigma lama. Kompleks sekolah Katolik menyatu dengan gereja paroki karena sejarah pendiriannya; kesatuan itu sekaligus menjadi sebuah faktor yang menentukan. Dengan tetap disatukannya kedua kompleks tersebut, terungkap tanggung jawab yang dilekatkan pada paroki, yakni bahwa Gereja (paroki termasuk di dalamnya) ikut bertanggung jawab pada proses pendidikan generasi muda. Menurut Kitab Hukum Kanonik, pastor paroki turut bertanggung jawab atas reksa pastoral dari sekolah-sekolah Katolik yang ada di dalam wilayah pelayanannya.[15] Kendati demikian, di dalam praktek sehari-hari, kendali urusan persekolahan ada pada

tangan yayasan yang menjadi pengelola sekolah. Reksa pastoral yang harus ditangani oleh pastor paroki dan kompleks persekolahan Katolik yang dekat gereja itu memperlihatkan tugas itu sebagai realitas nyata di depan mata yang harus dihadapi setiap hari.

Dengan gagasan untuk menggantikan kompleks persekolahan dan biara dengan lapangan parkir, diketengahkan suatu ide baru bahwa paroki mau mengambil jarak dari tanggung jawab lama dan lebih mengutamakan untuk memberi fasilitas pada satu satuan tugas baru dengan mendahulukan armada yang mempunyai mobilitas dari pada membina generasi muda. Di satu pihak, melibatkan diri pada pembinaan generasi muda merupakan proses panjang dan hasilnya tidak segera terlihat; pastor paroki mungkin tidak memiliki kewenangan administratif apa pun atas proses pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Maka, seorang pastor paroki dapat merasa terbebani oleh tanggung jawabnya dalam reksa pastoral untuk sekolah Katolik yang satu kompleks dengan gereja paroki. Di sisi lain, tanggung jawab atas reksa pastoral terhadap sekolah Katolik tersebut hanyalah sebagian dari tugasnya; reksa pastoral itu yang lebih luas dan mencakup seluruh wilayah paroki yang harus ditangani.[16] Dalam zaman yang menuntut supaya segalanya dilakukan secara cepat, apalagi kalau memiliki jangkauan wilayah pelayanan yang luas, kiranya dibutuhkan suatu satuan kerja yang mampu bergerak cepat, memiliki mobilitas tinggi. Dalam pertimbangan sedemikian itu, sang pastor menjatuhkan pilihan untuk menggunakan paradigma baru yang diusahakan untuk disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Bagaimana mempertimbangkan bobot pilihan dari kedua paradigma di atas? Pemindahan lokasi biara dan persekolahan yang ada di lingkungan paroki merupakan kesempatan *go public* untuk pihak sekolah maupun untuk biara. Untuk mewujudkan kemungkinan tersebut, kiranya perlu diukur sejauh mana kesiapan kedua lembaga tersebut. Dalam masa episkopatnya, mendiang Kardinal Justinus Darmojuwono sangat mendukung beberapa kongregasi religius, baik suster maupun bruder, untuk membangun komunitas-komunitas di wilayah-wilayah pelosok yang terpencil, suatu bentuk nyata dalam mewujudkan "Gereja yang mengumat"[17], semacam usaha *go public* untuk kelompok-kelompok religius. Usaha *go public* kaum religius juga diwujudkan Kardinal Darmojuwono dengan usul dan dorongannya untuk "program live-in" bagi

para religius. Usaha seperti itu butuh persiapan, pertimbangan, dan pengolahan yang memakan waktu lama serta membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri.[18]

Hal yang sama berlaku pada sekolah Katolik yang didorong untuk *go public*. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan untuk menilai kesiapan lembaga sekolah yang didorong untuk *go public* itu. Untuk selanjutnya, jika memang dinilai besar kemungkinan untuk melakukan hal tersebut, perlu dipersiapkan berbagai hal yang akan mendukung langkah tersebut. Dengan pertimbangan situasi kritis yang dialami oleh lembaga pendidikan Katolik sebagaimana telah disinggung di atas, tepatkah waktu gagasan *go public* untuk lembaga pendidikan Katolik diketengahkan? Jangan-jangan justru akan terjadi proses peminggiran peran dari para guru sekolah[19] yang selama ini terlibat bersama unsur-unsur lain dalam pengembangan kehidupan Gereja.[20] Justru kepada para pastor paroki perlu ditanyakan sejauh mana mereka telah menjalankan serta mengoptimalkan fungsi dalam melaksanakan reksa pastoral untuk sekolah-sekolah Katolik di wilayahnya? Bukankah siswa-siswi di sekolah Katolik juga merupakan sebuah komunitas basis yang membutuhkan sentuhan yang berkelanjutan dari seorang pastor paroki, apalagi di berbagai kota juga telah berhimpun siswa-siswi Katolik yang bersekolah di sekolah negeri karena merasa perlu mendapatkan pembinaan tambahan?

Selain memikirkan kedua pihak yang didorong untuk *go public*, kiranya perlu dipikirkan sungguh-sungguh konsep dasar dari satuan tugas baru dengan mobilitas tinggi yang lebih diprioritaskan tersebut: ke mana akan diarahkan, siapa yang akan disasar, berapa lama jangkauannya, dan lain-lain. Kajian terhadap hal-hal di atas bukanlah perkara mudah.

Almarhum Romo Mangunwijaya mengungkapkan bagaimana mobilitas pastor paroki sangat diperlukan dalam menjawab tantangan dunia modern, di situasi umat yang terpencar, baik karena faktor geografis, profesi umat yang beragam, maupun karena berada di dalam masyarakat Indonesia yang plural. Konsep yang diketengahkan adalah sistem jaringan dengan titik simpul bagaikan sistim syaraf yang berlaku dalam tubuh manusia. Dengan demikian, untuk menjawab tuntutan mobilitas zaman dan untuk menanggapi situasi diaspora masyarakat, lebih perlu dikontak dan digerakkan pribadi perseorangannya serta sistem pengaturannya, sehingga mampu menghubungkan satu dengan

yang lain dari berbagai tempat. Usaha tersebut sekaligus juga untuk menjangkau seluruh kelompok usia, dan dari berbagai profesi.[21]

Paradigma baru yang bercirikan kemampuan mobilitas dan interkomunikasi yang maksimal tersebut akan membangun "umat yang punya sikap dan pendirian tak tergoyahkan, berjumlah kecil bahkan sering sendirian di tengah lingkungan besar penuh dengan kekerasan, dan kebusukan atau korupsi. Ia (umat) tegak keras kepala dalam soal prinsip iman, harapan dan cinta kasih, tetapi lembut luwes terhadap sesama manusia konkret. Tanpa kehilangan rasa kesaudaraan dengan orang-orang lain, umat diasporadis memang dari kodrat hidupnya bagaikan seorang 'lone ranger' (pejuang kesepian)".[22] Sementara itu, gembalanya bertugas sebagai "task-force officer"; gambaran kepala kelompok ialah "seorang pastor (imam atau awam) yang bergerak dengan mobilitas lincah. Dengan membawa buku jadwal perkontakan dan agenda pertemuan yang sistematis (demi efisiensi dan penghematan bensin serta waktu) dengan sekian pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok aktivitas titik-titik simpul jaringan diaspora di mana-mana yang perlu dan urgen dikunjungi, dipantau, diteguhkan, dan didisain strategi dan taktik-taktik operasionalnya".[23] Dalam gereja Umat Allah itu, "tanggung jawab penghidupan, penyuburan, dan pemekaran Gereja ada pada seluruh dan semua anggota Gereja".[24]

Dalam mengembangkan gambaran "Gereja diaspora" itu, Romo Mangunwijaya berulang kali mengacu pada wujud jemaat di kekristenan awal. Gereja perdana itu berawal dari perjumpaan personal dengan Yesus Kristus. Orang-orang yang disapa oleh Yesus tidak terbatas pada pihak tertentu saja; berbagai kalangan menjadi pihak yang disapa oleh Yesus, termasuk golongan masyarakat yang waktu itu tidak diperhitungkan: kaum wanita (Yoh 4:1-42) dan anak-anak (Mrk10:13-16; Mat 19:13-15), bahkan juga para pendosa dan pemungut cukai yang dikucilkan oleh masyarakatnya. Usaha Yesus Kristus dalam mewartakan dan menghadirkan Kerajaan Allah meretas batas pembedaan jenis kelamin, batas usia, dan golongan masyarakat tertentu. Dalam perkembangan jemaat awal selanjutnya, semangat pewartaan Yesus Kristus itu diingatkan kembali oleh Rasul Paulus, supaya jemaat tidak terjebak dalam arus yang membeda-bedakan (Kol 3:11).

Prospek Mendatang

Dalam memasuki milenium III, saat untuk membarui diri masa baru yang mengintegrasikan kembali dari kesalahan-kesalahan lama yang telah terjadi,[25] Paus Yoannes Paulus II dalam surat pastoralnya, *Tertio Millenio Adveniente*, mengajak seluruh Gereja untuk mengkaji kembali dinamika perjalanan sejarah Gereja universal dan sejarah Gereja lokal yang telah turut menyumbang bagi perkembangan, tidak melulu bagi Gereja saja tetapi juga perkembangan peradaban dunia di berbagai wilayah dunia (TMA 25).[26] Dari kajian terhadap sejarahnya yang telah berlangsung, Gereja akan dimampukan untuk memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan selanjutnya.

Sejarah Gereja lokal tidaklah terlepas dari sejarah Gereja universal; keberadaan Gereja setempat tidaklah terlepas dari usaha Gereja universal. Dalam hal berkaitan dengan kasus di atas, biara dan kompleks persekolahan yang diselenggarakan merupakan suatu faktor universal karena jaringan luas yang dimiliki oleh kongregasi/ordo religius yang dengan komunitas biaranya hadir di tempat tersebut. Namun demikian, pada gilirannya dalam perkembangan sejarah, Gereja lokal tidaklah melepaskan ikatannya dan keterlibatan terhadap gerak Gereja universal.[27] Komunitas lokal, di mana biara tersebut berada, memberikan sumbangan secara khas bagi dinamika sejarah dari kongregasi yang adalah bagian dari sejarah Gereja universal. Namun, hal itu tidak berarti bahwa Gereja setempat menjadi lamban, tidak lagi responsif terhadap semangat pembaruan demi perkembangan lebih lanjut.

Dalam situasinya sekarang, Lembaga Pendidikan Katolik ada dalam masa kritis, demikian pun paroki berada dalam fase kritis. Untuk menanggapi situasinya sekarang, perlu dirumuskan kembali identitas awal, yang autentik, asali: identitas Gereja perlu diletakkan dalam kerangka eklesiologis, pneumatologis, antropologis.[28] Hidup Gereja sebagai persekutuan dijiwai dan digerakkan oleh Roh yang sama; dari gerakan Roh hidup Gereja membuahkan kasih, damai, dan keadilan dengan tetap bertolak dari situasi manusiawi yang dipengaruhi oleh keadaan temporal manusiawi setempat, untuk bertindak secara bijaksana. Bertolak dari pemahaman akan identitas tersebut, maka proses transformasi diharapkan dapat berjalan melewati krisis dengan selamat sampai pada bentuknya yang baru.

Di dalam konteks ini, keuskupan sebagai bagian sentral dari sebuah sistem kibernetik[29] yang berperan untuk mensinergikan berbagai pihak dengan peranan dan fungsinya di dalam Gereja maupun masyarakat luas, mampu mengajak Gereja secara bersama menjadi *agent of change* dalam menjalani masa dan tahapan transformasi. Dengan demikian, akan terhindarkan pola berpikir dan tindakan yang bersifat fragmentaris dan parsial.

CATATAN

1 *100 tahun Gereja Katedral Bogor. Berbakti, Mengabdi, Melayani*, 1991, hlm. 15; *Buku Kenangan Peresmian dan Pemberkatan Gedung Gereja Fransiskus Xaverius Kidulloji Yogyakarta, 3 Desember 1997*, 1997, hlm. 21-26.

2 Daniel Tatag – Budi Sardjono (ed.), *Pesta Air di Kaki Pelangi. Refleksi Karya Pastoral Paroki*, Yogyakarta 1997.

3 *Kenangan 50 Tahun Gereja Santa Maria Lourdes Paroki Promasan*, 1990, hlm. 25-30; *Napas Gereja Perbatasan. Kenangan Penuh Syukur 70 Tahun Gereja Santa Theresia Sedayu*, 1997, hlm. 8-12; *60 Tahun Jejak Langkah Gereja Pinggiran. Gereja Katolik Santa Perawan Maria Bunda Penasihat Baik, Wates*, hlm. 15-25; R. Marjono, dkk. (ed.), *Yayasan Kanisius Setelah 75 Tahun*, Yogyakarta 1993, hlm. 24-29.

4 *Gereja Katolik Hati Kudus Tanah Mas Paroki Katedral Semarang, 6 Juni 1986*, hlm. 34-40; *Kenangan Pembangunan Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul di Pringwulung Yogyakarta, 27 Desember 1997*, hlm. 24-29.

5 J. A. Coriden, *The Parish in Catholic Tradition. History, Theology and Canon Law*, New York, Paulist Press, 1997, hlm. 28-34.

6 B.S. Mardiatmadja, "Gereja Indonesia Menyongsong Tahun 2000", dlm: *Gereja Katolik Indonesia Pasca Vatikan II*, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hlm. 35-55.

7 G. Scarvaglieri, *Sociologia della Parrocchia*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1991, hlm. 68-73.

8 Sr. Magdaline, dkk., *Deus Providebit. 125 tahun tarekat O.S.F. di Indonesia*, Malang, 1995; L. Satini, *Sejarah Tarekat Suster-suster Carolus Borromeus di Indonesia 1918-1960*, Yogyakarta, 1992.

9 G. Budi Subanar, "Seabad van Lith seabad Soegijapranata", dlm: *Gereja Katolik Indonesia Pasca Vatikan II*, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hlm. 419-441.

10 J. Weitjens, "Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Agung Semarang", dlm: MPM. Muskens (ed.), *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Vol. III.B, Ende, Percetakan Arnoldus, 1974, hlm. 843-902.

11 H van Vorst tot Vorst, "Profil Pejuang Kanisius", dlm: *Yayasan Kanisius Setelah 75 Tahun*, R. Marjono – al. (eds.), Yogyakarta, 1993.

12 T. Suyudanto, "Gerak Penyelamatan Kanisius. Pendidikan Harus Steril dari Kepentingan Politik Sesaat"; *Internos* 44(2000)5-11.

13 Conny R. Semiawan-Soedijarto (ed.), *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, Jakarta, Grasindo, 1991; A. Atmadi- Y. Setiyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakara, Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 1995; Mochtar Buchori, *Transformasi Pendidikan*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1995.

14 Artikel G.P. Sindhunata, dalam *Kompas* 22/9/2001.

15 KHK 519, 528 § 1, 794 § 2.

16 Reksa pastoral meliputi 5 elemen berikut: pelayanan sabda, pelayanan sakramental, pelayanan pastoral karitatif, pelayanan kesaksian, dan pelayanan koordinatif dan administratif. James A. Coriden, 1997, hlm. 94-96.

17 J. Hadiwikarta, Pr (penyunting), *Justinus Darmojuwono. Kardinal Pertama Indonesia*, Jakarta, Obor, 1987, hlm. 74-75.

18 Christera, CB, "Kaum Religius Wanita dan Pemihakan pada Rakyat Kecil", dlm: *Gereja Indonesia Pasca Vatikan II*, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hlm. 135-154.

19 Fl. Hasto Rosariyanto (ed.), *Bercermin pada Wajah-Wajah Keuskupan Gereja Katolik Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hlm. viii-ix.

20 Dalam berbagai serial *Sayur Lodeh Kehidupan*, GP Sindhunata, SJ dkk. menampilkan suka duka berbagai profesi, yakni guru, perawat, katekis, dalam kehidupan kesehariannya.

21 Y.B. Mangunwijaya, *Gereja Diaspora*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1999, hlm. 72-78, 103-138.

22 *Ibid.* hlm. 148.

23 *Ibid.* hlm. 139-140.

24 *Ibid.* hlm. 167-169.

25 David Walsh, *The Third Millenium: Reflections on Faith and Reason*, Washington DC, Georgetown University Press, 1999, hlm. 8-13.

26 *Surat Apostolik Tertio Millennio Adveniente (Kedatangan Milenium Ketiga) Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II kepada Para Uskup, Para Rohaniwan dan Kaum Awam tentang Persiapan menyambut Yubileum Agung Tahun 2000*, Kanisius, 1997, hlm. 38-40.

27 G. Silvestri, *La Chiesa Locale "Soggeto Culturale"*, Roma, Edizione Dehoniane, 1998, hlm. 186-195.

28 Servizio Nazionale della CEI per Il Progetto Culturale e Associazioni Teologiche Italiane, *Identità Nazionale Culturale e Religiosa*, Milano, San Paolo, 1999, hlm. 27-32, 77-86.

29 P. Granfield, *Ecclesial Cybernetics. A Study of Democracy in the Church*, New York-Toronto, The Macmillan Company, 1973, hlm. 49-58.